

MANAJEMEN PUBLIK
ANALISIS BERBAGI PANDANGAN DALAM KEGIATAN PENGAWASAN EKSTERNAL
PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK MARJINAL DI DAERAH 3T

DOSEN PENGAMPU :
INTAN FITRI MEUTIA,S.A.N.,M.A.,Ph.D



DISUSUN OLEH :
WINA OKTA FEBIANA (2356041024)
MANDIRI A

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan pelayanan publik bagi kelompok marjinal di daerah-daerah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan, terluar) telah menjadi fokus utama Ombudsman RI. Daerah-daerah ini menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya infrastruktur, akses transportasi yang terbatas, dan kualitas pendidikan yang kurang baik. Ombudsman RI melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat di daerah-daerah ini.

Dalam kegiatan pengawasan ini, Ombudsman RI juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang tidak mematuhi hasil pengawasan, sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara Ombudsman RI, Pemda, dan Direktorat PEPPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah-daerah 3T.

Dalam konteks ini, “Berbagi Pandangan dalam Kegiatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik Bagi Kelompok Marjinal di Daerah 3T” berfokus pada bagaimana Ombudsman RI dan jajaran Pemda dapat berbagi pandangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah-daerah 3T. Kegiatan ini membahas hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi yang dilakukan antara Ombudsman RI, Pemda, dan Direktorat PEPPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi.

Kata "berbagi" menunjukkan bahwa analisis ini akan membahas pandangan atau perspektif yang berbeda-beda dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah pengawasan eksternal pelayanan publik.

Kegiatan pengawasan eksternal pelayanan publik berarti analisis ini akan membahas bagaimana pelayanan publik dijamin dan diperbarui oleh pihak luar, seperti organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah.

Kelompok marjinal adalah kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap pelayanan publik dan memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Analisis ini akan membahas bagaimana pelayanan publik dapat diperbarui dan menjanjikan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok marjinal.

Daerah 3T (Tingkat, Tertinggal, dan Terdepan) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kesulitan yang lebih tinggi. Analisis ini akan membahas bagaimana pelayanan publik dapat diperbarui dan mempromosikan di daerah-daerah ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

HASIL ANALISIS

1.2 Hasil Analisis Variasi Tugas Menggunakan:

Teori Resources Allocation Models/Jobs Characteristic Models (Richard Hackman and Greg R Oldham, 1976).

1. Variasi Keterampilan

Menyediakan berbagai aktivitas yang memerlukan keterampilan yang berbeda-beda untuk meningkatkan kesadaran pekerjaan dan motivasi.

2. Identitas Tugas:

Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menyelesaikan tugas yang lengkap dan teridentifikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan motivasi.

3. Kepentingan tugas:

Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan kontribusi pada hasil yang signifikan dan berdampak pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan motivasi.

4. Otonomi:

Memberikan kebebasan dan kemandirian pekerja dalam mengatur jadwal dan prosedur kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan motivasi.

5. Umpan Balik:

Menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang kinerja pekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan motivasi.

KESIMPULAN

Pengawasan pelayanan publik bagi kelompok marjinal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) oleh Ombudsman RI sangat penting karena daerah-daerah ini menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya infrastruktur, akses transportasi terbatas, dan kualitas pendidikan yang rendah. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI menunjukkan bahwa masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum mematuhi hasil pengawasan, sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Ombudsman RI,

Pemerintah Daerah (Pemda), dan Direktorat PEPPD. Kegiatan "Berbagi Pandangan dalam Kegiatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik Bagi Kelompok Marjinal di Daerah 3T" berfokus pada berbagi perspektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui diskusi dan evaluasi bersama. Upaya ini melibatkan berbagai strategi seperti peningkatan variasi keterampilan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik bagi pekerja untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sesario, R. (2022). Pengaruh peran dan kepuasan pekerjaan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Universitas Negeri Malang.
- Pambudi, AS, & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. Ombudsman RI.
- Nafisah Ilham Hussin, AM Syamsuddin, MM Razali, dan SN Boyman. (2023). Pelaksanaan wewenang Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur. Universitas Nusa Cendana, Indonesia.
- Nurlita Purnama, Annisa Miskiyah, dan Muhammad Khoirul Anwar. (2024). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Relasi Publik.
- Muhammad rifa'i, Wawan Tri juniarto. (2022). Peran bupati terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. Birokrasi pancasila.
- Alexander phuk tjilen. (2019). Konsep teori dan teknik analisis implementasi kebijakan publik. Nusa media.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. (2023). Pusaran kemiskinan dalam perspektif pelayanan publik. Syakir media press.
- Ade Rina Sari. (2024). Reformasi Pelayanan Publik. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa Jl. Kamal Raya, RT.9/RW.7, Cengkareng Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730 www.indonesia8.com.
- Mustanir, A. (2022). Pelayanan Publik. Penerbit Qiara Media.
- Ombudsman RI. (2021). Potret Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah dan Kelompok Marjinal. Ombudsman RI.